

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Aziz Hakim. (2011). *Hukum Negara dan Demokrasi di Indonesia*.

Pustaka Pelajar.

Ahmad Qisai. (2015a). *Pemilihan Kepala Daerah*. Sindo.

Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Konstitusi Press.

Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jilid II Cet 1). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.

Asshiddiqie, J. (2014). *Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press.

Attamimi, A. H. S. (2021). *Teori perundang-undangan Indonesia*.

Azhary. (1993). *Negara hukum Indonesia suatu analisis yuridis normatif tentang unsur-unsurnya*. UI Press.

Chofifi, L., & Kusdarini, E. (2024). *Penyelesaian Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi*. Universitas Brawijaya Press.

Daniel S. Lev. (1990). *Hukum dan Politik Indonesia*. LP3ES.

Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1985). *Pengantar hukum tata negara indonesia*. Pusat Studi hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, F. (2022). *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilkada*. Genta Publishing.
- Montesquieu. (1689). *De l'esprit des loix ou Du rapport que les loix doivent avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les moeurs, le climat, la religion, le commerce, &c. T. 1*. Bibliothèque nationale de France, département Arsenal.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum* (1st ed.). Citra Aditya Bakti.
- Muin Fahmal. (2006). *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*. UII Press Yogyakarta.
- Nurjihad, A. (2021). *Mahkamah Konstitusi dan Perannya dalam Menyelesaikan Sengketa Pilkada*. CV Inti Media.
- Pide, H., & Andi Mustari. (2009). *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*. Wildan Akademika dan Universitas Ekasakti Press.
- Sembiring, D. (2021). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Demokrasi Lokal*. Kencana.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Cet. 4). Ghalia Indonesia.

Sulistiyono, A. (2008). *Negara hukum kekuasaan, konsep, dan paradigma moral*. LPP UNS dan UNS Press.

Usep Ranawijaya. (1983). *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*. Ghalia Indonesia.

Yuhana Abdy. (2020). *Kedaulatan Rakyat Menurut Sistem Ketatanagaraan Indonesia*. Penerbit Fokusmedia

Yusran, A. (2022). *Hukum Pemilu dan Keadilan Elektoral*. Nurul Fikri Press.

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.KOT-XVI/2018

C. Sumber Lainnya

Ahmad Qisai. (2015b, December). Pemilihan Kepala Daerah. *Harian Kompas*.

Aulia, Rizka & Santoso, Bima. “Studi Evaluatif atas Implementasi Putusan MK dalam Sengketa Pilkada 2020–2024.” *Jurnal Konstitusi Indonesia*, Vol. 21 No. 1, 2024.

Aulia, Rizka & Santoso, Bima. “Urgensi Pembentukan Peradilan Pemilu di Indonesia.” *Jurnal Tata Negara*, Vol. 20 No. 1, 2024.

Azkia, A. (2024, August 13). MAHKAMAH KONSTITUSI: SEJARAH, WEWENANG, DAN TANTANGAN DARI BENTENG TERAKHIR DEMOKRASI. *Klik Hukum*.

Chofifi, A. N., & Kusdarini, E. (2024). Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, PP 408-433.

Fatimah, S. (2020, December 12). Hasil Rekapitulasi Suara Pilkada Kabupaten Bandung. *Tribun Jabar*.

Ikhsan Darmawan. (2010). Menata Aturan Pemilu, Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional dengan tema “Evaluasi Satu Dasawarsa Pelaksanaan Otonomi Daerah”.

Isnaeni, Eko Soponyono. “Batasan Waktu dan Keadilan Substantif dalam PHPU di MK.” *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 8 No. 1, 2020.

Kumorotomo, Wahyudi. “Penguatan Lembaga Konstitusi dalam Demokrasi Lokal.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 23, No. 1, 2019.

Mujiono. (2021, April 11). *Mengenal Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi*. JDIH Banyuwangikab.

Nugroho, W. E. (2014). Implementasi Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. *Gema Keadilan*, 1(1), 49–54.

Rahmawati, Dina. “Efektivitas Pelaksanaan Putusan MK dalam Sengketa Pilkada Serentak.” *Jurnal Hukum & Pemilu*, Vol. 7 No. 2, 2023.

Setiawan, H., Wisnaini, F., & Asy’ari, H. (2016). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013 TENTANG INKONSTITUSIONALITAS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENYELESAIKAN PERSELISIHAN

HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH. *Diponegoro Law Review*, Vol 5 No 2.

Siagian, W. (2022, January 31). PSU Pilkada Yalimo, Nahor Nekwek-John Wilil Unggul dengan 48.504 Suara. *Detik News*.

Sutisna, Didi. "Problem Kewenangan MK dalam Mengadili Sengketa Pemilu." *Jurnal Pemilu & Demokrasi*, Vol. 17 No. 3, 2021.

Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (2017). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 328–338.

Yusdi, Ahmad. "Implementasi Sifat Final dan Mengikat Putusan MK dalam Sengketa Pemilihan Umum." *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No. 2, 2020.

Zoelva, H. (2013). Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Volume 10 Nomor 3.